



Pendampingan

Tata Kelola Pemerintah Daerah

Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A
Prof. Puji handayati, S.E., Ak., M.M., CA., CMA
Rifaldy Adinandra Ferdiansyah
Fathan Abrar Abdalla

Pendampingan

Tata Kelola Pemerintah Daerah

Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal di Indonesia. Pada buku ini akan dijelaskan terkait berbagai aspek dari pendampingan agar terwujud tata kelola pemerintah daerah yang baik, mulai dari pengertian hingga kasus-kasus sukses, serta tantangan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam bab terakhir ini, mari kita merangkum poin-poin kunci yang telah kita bahas dan membahas langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan pendampingan tata kelola pemerintah daerah.

Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terlibat, perubahan yang positif adalah mungkin. Pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mengubah hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan ekonomi lokal, dan inovasi. Kunci untuk terus maju adalah memastikan keberlanjutan proses pendampingan dan terus beradaptasi dengan perubahan. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam perjalanan Anda dalam meningkatkan tata kelola pemerintah daerah di Indonesia.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC002023108594



PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A
Prof. Puji handayati, S.E., Ak., M.M., CA., CMA
Rifaldy Adinandra Ferdiansyah
Fathan Abrar Abdalla



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Penulis : Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A
Prof. Puji handayati, S.E., Ak., M.M., CA.,
CMA
Rifaldy Adinandra Ferdiansyah
Fathan Abrar Abdalla

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Leli Agustin

ISBN : 978-623-151-660-2

No. HKI : EC002023108594

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Daerah ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca dalam memahami bagaimana proses pendampingan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam buku ini, dijelaskan terkait Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal di Indonesia. Pada buku ini akan dijelaskan terkait berbagai aspek dari pendampingan agar terwujud tata kelola pemerintah daerah yang baik, mulai dari pengertian hingga kasus-kasus sukses, serta tantangan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam bab terakhir ini, mari kita merangkum poin-poin kunci yang telah kita bahas dan membahas langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan pendampingan tata kelola pemerintah daerah.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang tata kelola pemerintah daerah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Malang, 1 Oktober 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 PENGENALAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH | 1 |
| A. Pengertian Pendampingan Tata Kelola..... | 2 |
| 1. Definisi Ruang Lingkup Pendampingan..... | 2 |
| 2. Peran Penting Pendampingan dalam Pemerintah Daerah | 3 |
| B. Kenapa Pendampingan Diperlukan..... | 4 |
| 1. Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah... 4 | |
| 2. Manfaat dari Pendampingan yang Efektif | 5 |
| BAB 2 PERSIAPAN UNTUK PENDAMPINGAN | 7 |
| A. Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah..... | 7 |
| 1. Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang | 7 |
| 2. Analisis Kebutuhan dan Prioritas | 8 |
| B. Perencanaan Pendampingan..... | 9 |
| 1. Menyusun Rencana Pendampingan | 10 |
| 2. Menentukan Sasaran dan Tujuan | 11 |
| BAB 3 PELAKSANAAN PENDAMPINGAN | 13 |
| A. Memulai Pendampingan..... | 13 |
| 1. Memilih Metode Pendampingan yang Sesuai | 13 |
| 2. Membangun Hubungan dengan Pemerintah Daerah | 14 |
| B. Implementasi Program Pendampingan..... | 15 |
| C. Mengatasi Tantangan dalam Pelaksanaan | 16 |
| D. Keberlanjutan Pendampingan | 17 |
| E. Pemantauan dan Evaluasi..... | 18 |
| 1. Mengukur Kemajuan dan Kinerja..... | 18 |
| 2. Perubahan Strategi dan Tindakan Korektif..... | 20 |
| F. Keberlanjutan Hasil Pendampingan | 21 |
| BAB 4 ALAT PENDAMPINGAN YANG EFEKTIF | 23 |
| A. Pelatihan dan Kapasitas | 23 |
| 1. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial..... | 24 |
| 2. Meningkatkan Kemampuan Teknis..... | 25 |
| B. Pendekatan Berkelanjutan..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| C. Pengukuran Keberhasilan | 27 |
| D. Bimbingan dan Konsultasi | 28 |
| 1. Memberikan Arahan dan rekomendasi | 28 |
| 2. Membantu dalam Pengambilan Keputusan..... | 29 |
| E. Pendekatan Kolaboratif | 30 |
| F. Pengukuran Keberhasilan | 31 |
| G. Sumber Daya Pendukung..... | 32 |
| 1. Akses ke Ahli dan Sumber Daya Tambahan..... | 32 |
| 2. Dukungan Teknologi Informasi | 33 |
| H. Penggunaan Sumber Daya dengan Bijak | 34 |
| BAB 5 STUDI KASUS PENDAMPINGAN SUKSES | 35 |
| A. Pemerintah Daerah: Transformasi Tata Kelola yang Sukses | 35 |
| B. Pemerintah Daerah: Inovasi dalam Pelayanan Publik..... | 37 |
| C. Pelajaran dari Kasus-kasus Sukses | 38 |
| 1. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan | 38 |
| 2. Strategi Pendampingan yang Efektif..... | 40 |
| BAB 6 TANTANGAN DALAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH | 43 |
| A. Pelajaran dari Kasus-kasus Sukses | 43 |
| 1. Hambatan dalam Perubahan Budaya Organisasi ... | 43 |
| 2. Koordinasi Antara Stakeholder | 44 |
| B. Solusi dan Strategi Mengatasi Tantangan..... | 45 |
| 1. Menerapkan Pendekatan Terpadu..... | 46 |
| 2. Membangun Keterlibatan Masyarakat yang Kuat..... | 46 |
| 3. Memanfaatkan Teknologi dan Inovasi | 47 |
| BAB 7 KESIMPULAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA | 49 |
| A. Poin-Poin Kunci..... | 49 |
| 1. Menggugah Potensi Pemerintah Daerah Melalui Pendampingan | 49 |
| 2. Memastikan Keberlanjutan Proses Pendampingan | 50 |
| B. Langkah Selanjutnya..... | 51 |
| C. Kesimpulan..... | 52 |

| | |
|-----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| TENTANG PENULIS | 55 |



**PENDAMPINGAN TATA KELOLA
PEMERINTAH DAERAH**

Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A
Prof. Puji handayati, S.E., Ak., M.M., CA., CMA
Rifaldy Adinandra Ferdiansyah
Fathan Abrar Abdalla



BAB 1

PENGENALAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH



Pemerintahan daerah adalah fondasi penting dalam sistem pemerintahan suatu negara (Setiadi & Astawa, 2023). Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Pemerintahan daerah merupakan elemen yang mengemban peran dalam mengelola pemerintah daerah, memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintah termasuk dalam lingkup kewenangan daerah otonomi. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efisien dan efektif sangat menentukan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah adalah pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Bab ini akan memperkenalkan konsep pendampingan tata kelola pemerintah daerah, mendefinisikan ruang lingkupnya, dan menjelaskan peran pentingnya dalam konteks pemerintahan daerah.

BAB 2

PERSIAPAN UNTUK PENDAMPINGAN

Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal (Jualinto & Dewi, 2019). Sebelum memulai proses pendampingan, penting untuk melakukan persiapan yang baik. Bab ini akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil dalam persiapan untuk pendampingan tata kelola pemerintah daerah.

A. Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah

Identifikasi kebutuhan pemerintah daerah adalah langkah awal yang krusial dalam persiapan untuk pendampingan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah, serta analisis kebutuhan dan prioritas mereka.

1. Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang beragam. Untuk memulai pendampingan yang efektif, penting untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dengan cermat. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam proses ini adalah:

a. Konsultasi dengan Pemerintah Daerah

Langkah awal adalah berkomunikasi secara aktif dengan pemerintah daerah yang akan mendapatkan pendampingan. Ini mencakup pertemuan dengan pejabat pemerintah, pegawai, dan pihak terkait lainnya untuk mendengarkan perspektif mereka tentang masalah-masalah yang dihadapi.

BAB 3

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Setelah persiapan yang matang, langkah selanjutnya dalam proses pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah pelaksanaan. Bab ini akan membahas tahapan awal dalam pelaksanaan pendampingan, termasuk pemilihan metode pendampingan yang sesuai dan membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah yang mendapatkan pendampingan.

A. Memulai Pendampingan

Memulai pendampingan adalah langkah penting dalam proses pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun dalam bab sebelumnya akan diimplementasikan. Pelaksanaan pendampingan harus dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan saat memulai pendampingan:

1. Memilih Metode Pendampingan yang Sesuai

Memilih metode pendampingan yang sesuai adalah langkah awal yang sangat penting dalam memulai pendampingan. Metode pendampingan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan sifat pemerintah daerah yang mendapatkan pendampingan. Berikut adalah beberapa metode pendampingan yang umum digunakan:

a. Pelatihan dan Workshop

Metode ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam berbagai

BAB 4

ALAT PENDAMPINGAN YANG EFEKTIF



Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi alat-alat pendampingan yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintah daerah. Alat-alat ini mencakup berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas dan kinerja pemerintah daerah. Dalam bagian ini, kita akan membahas pelatihan dan kapasitas sebagai salah satu alat utama dalam pendampingan tata kelola pemerintah daerah.

A. Pelatihan dan Kapasitas

Pelatihan dan kapasitas adalah alat penting dalam pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Ini memungkinkan pegawai pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam mengelola tugas-tugas yang kompleks. Dalam bagian ini, kita akan membahas dua aspek utama dari pelatihan

BAB 5

STUDI KASUS PENDAMPINGAN SUKSES

Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi beberapa kasus pendampingan yang sukses di Indonesia. Kasus-kasus ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pendampingan telah membantu pemerintah daerah dalam mencapai transformasi tata kelola yang sukses dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

A. Pemerintah Daerah: Transformasi Tata Kelola yang Sukses

Studi Kasus 1: Kota Surabaya - Transformasi Tata Kelola yang Efektif

Kota Surabaya adalah salah satu contoh sukses dalam mengubah tata kelola pemerintah daerah. Pada awal 2000-an, Surabaya menghadapi tantangan serius dalam hal pelayanan publik yang buruk, birokrasi yang lambat, dan masalah korupsi. Namun, dengan bantuan pendampingan dari organisasi internasional dan lembaga pemerintah pusat, Surabaya berhasil melakukan transformasi yang signifikan.

Pendampingan dimulai dengan analisis mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh Surabaya. Ini mencakup kajian tentang proses-proses birokrasi, pelayanan publik yang ada, dan evaluasi kinerja pegawai pemerintah. Berdasarkan hasil analisis ini, rekomendasi dan rencana perbaikan konkret dibuat.

Salah satu langkah penting dalam transformasi ini adalah reformasi birokrasi. Surabaya memperkenalkan sistem manajemen kinerja yang lebih baik, memotong red tape, dan memberlakukan standar pelayanan publik yang lebih tinggi.

BAB 6

TANTANGAN DALAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

A. Pelajaran dari Kasus-kasus Sukses

Meskipun pendampingan tata kelola pemerintah daerah memiliki potensi untuk mencapai perubahan yang signifikan, ada sejumlah tantangan yang sering dihadapi dalam proses ini. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat perjalanan menuju perubahan yang berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan membahas kendala umum yang sering dihadapi dalam pendampingan tata kelola pemerintah daerah di Indonesia.

1. Hambatan dalam Perubahan Budaya Organisasi

Perubahan budaya organisasi seringkali merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pendampingan tata kelola pemerintah daerah. Budaya organisasi yang sudah mapan dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat langkah-langkah reformasi yang diusulkan. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang dapat muncul:

- a. Resistensi Terhadap Perubahan: Pegawai pemerintah daerah yang telah terbiasa dengan cara kerja yang lama mungkin resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin merasa nyaman dengan rutinitas lama dan tidak ingin mengubahnya.
- b. Ketidakpastian dan Kekhawatiran: Perubahan seringkali diikuti oleh ketidakpastian. Pegawai mungkin khawatir tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi pekerjaan mereka, status mereka, atau lingkungan kerja mereka.

BAB 7 | KESIMPULAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA

Pendampingan tata kelola pemerintah daerah adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal di Indonesia. Selama perjalanan ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek dari pendampingan ini, mulai dari pengertian hingga kasus-kasus sukses, serta tantangan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam bab terakhir ini, kita akan meringkas poin-poin kunci yang telah dibahas dan membahas langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan pendampingan tata kelola pemerintah daerah.

A. Poin-Poin Kunci

1. Menggugah Potensi Pemerintah Daerah Melalui Pendampingan



Salah satu poin kunci yang telah kita pelajari adalah potensi besar yang dimiliki pemerintah daerah dalam mendorong perubahan positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajabar. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Gilang Pramudhietha. 2017. ANALISIS BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal ums*, 9(1).
- Heri Setiawan dkk. 2021. Pengaruh Penggunaan Media E-Learning dan Transfer Pengetahuan dalam Kuliah Daring/Online Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Dosen Tetap Unika Musi Charitas. *Jurnal ukmc*, 5(1).
- Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).
- Kamaruddin, Jamaluddin, Mustanir Ahmad. 2019. STRATEGI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Kasmir. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (Edisi ke-5). PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Nganjuk. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1).
- Rambe, J.Y Badaruddin & Kadir, A .2020. Konsep Pendampingan dalam Struktur Pemerintahan Indonesia: Mengapa Pendampingan Lokal Desa Harus Ada?. *PERSPEKTIF*, 9(2): 263-269.

- Rostiawati, E. (2020). Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Menciptakan Good Governance. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 59-69.
- Sari, D. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten).
- Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 59-72.
- Sudaryo, Yoyo., Agus Aribowo, Nunung ayu Sofiati. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukarno . 2022. Peningkatan Keterampilan Guru Membuat LKPD Belajar Dari Rumah Melalui Kegiatan Workshop Di SDN Sumurpule Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal Intersections*, 7(2):79-90.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wawat Setiawati. 2023. Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bandung. *Jurnal rumah ilmiah*, 1(2).

TENTANG PENULIS

Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A



Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. merupakan dosen di Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang. Lahir di Jember pada tanggal 10 April 1995. Menempuh jenjang pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Jember pada tahun 2012-2016, dan melanjutkan studi S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2017-2019. Sebelum masuk menjadi dosen di Universitas Negeri Malang pada tahun 2021, Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. memiliki pengalaman sebagai auditor, peneliti dan juga sebagai dosen di Universitas Jember. Bidang yang diminati adalah inovasi dan digitalisasi akuntansi, manajemen investasi dan pasar modal, akuntansi keperilakuan, serta kewirausahaan. Pengalaman mengajar yang dimiliki antara lain: audit berbasis teknologi informasi, praktikum audit ACL, komputer akuntansi, teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi dan bisnis digital, studi kelayakan bisnis, dan masih banyak lagi. Pada saat ini memiliki banyak publikasi yang telah dipublikasikan antara lain: 3 buku, lebih dari 60 artikel penelitian dan pengabdian baik nasional dan internasional, dan juga lebih dari 180 HKI. Telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sehingga pada saat ini berhak memiliki tambahan gelar professional CBV, CAP, QWP, RSA dan RTA.

Prof. Puji handayati, S.E., Ak., M.M., CA., CMA



Prof. Puji handayati, S.E., Ak., M.M., CA., CMA adalah Guru Besar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Pada 2006, Beliau memperoleh gelar Dr dalam Akuntansi Manajemen dari Universitas brawijaya Malang. Minat penelitiannya meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, ilmu ekonomi, pasar modal, metode penelitian, keberlanjutan, Pemerintahan dan Manajemen Keuangan Desa. Beliau telah menghasilkan sejumlah besar jurnal akademik yang diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM), Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JBMA), International Journal of Business Economics and Law (IJBEL), South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law (SEAJCBEL), International Conference on Management Economics & Social Science (ICMES) and Annual London Business Research Conference (ALBRC). Puji Handayati juga merupakan ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya (IAI) dari tahun 2016 hingga sekarang. Selama beliau aktif di berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan akademik maupun organisasi profesi, penulis merupakan sosok yang sangat mendalami tentang Koperasi dan UKM dan juga Manajemen Keuangan Desa. Dibeberapa kesempatan beliau menjadi pendamping dalam beberapa kegiatan seperti: Pendampingan Manajemen Keuangan BUMD, Pendampingan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kopwan 2014 di Kab. Probolinggo, Malang dan Pasuruan, Pendampingan Pembentukan Kewirausahaan Baru Jawa Timur, Pendampingan Akses Pembiayaan Koperasi Wanita dalam rangka Perkuatan Permodalan dan Pendampingan Software Manajemen Keuangan Desa pada 15 Desa Di Kecamatan Gempol.

Rifaldy Adinandra Ferdiansyah



Rifaldy Adinandra Ferdiansyah merupakan mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan FEB UM. Lahir di Madiun 10 September 2001. Penulis pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun dan hingga saat ini menempuh Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Sejak SMP penulis aktif mengikuti organisasi hingga sekarang penulis aktif mengikuti kegiatan di dalam dan di luar kampus antara lain Forum Mahasiswa Madiun Studi Malang (FORMADIMA) dan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Penulis memiliki beberapa pengalaman sebagai Ketua Pelaksana dan Koordinator dalam kegiatan keorganisasian. Selain itu, penulis juga aktif dalam mengikuti kompetisi kemahasiswaan dan berhasil untuk meraih penghargaan sebagai pemenang dan finalis. Telah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi pada bidang pasar modal dan digital marketing.

Fathan Abrar Abdalla



Fathan Abrar Abdalla merupakan mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UM. Lahir di Kota Surabaya pada tanggal 13 Mei 2003. Penulis pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo dan hingga saat ini menempuh Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Sejak SMP penulis aktif mengikuti organisasi hingga sekarang penulis aktif mengikuti kegiatan di dalam kampus antara lain Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) Akuntansi 2022 sebagai anggota Divisi IT. Penulis sekarang mengemban amanah sebagai Kepala Departemen Research & Technology Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) Akuntansi dan Koordinator Asisten

Laboratorium Akuntansi. Penulis memiliki beberapa pengalaman sebagai Ketua Pelaksana dan Koordinator dalam kegiatan keorganisasian. Pada tahun 2023 penulis berhasil lolos sebagai salah satu penerima beasiswa Djarum Beasiswa Plus. Selain itu, penulis juga aktif dalam mengikuti kompetisi kemahasiswaan dan berhasil untuk meraih penghargaan sebagai pemenang dan finalis.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023108594, 9 November 2023

Pencipta
Nama : Tony Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A., Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.,
Ak., M.M., CA., CMA dkk
Alamat : Dusun Curah Bamban RT 1 RW 27 Tanggul Wetan, Tanggul, Kota
Jember 68155, Tanggul, Jember, Jawa Timur, 68155
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Tony Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A., Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.,
Ak., M.M., CA., CMA dkk
Alamat : Dusun Curah Bamban RT 1 RW 27 Tanggul Wetan, Tanggul, Kota
Jember 68155, Tanggul, Jember, Jawa Timur, 68155
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Daerah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Oktober 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000541548

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.